

**TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DAN GOLONGAN KARYA DALAM
MENYUKSESKAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH**
(Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syari'ah (S.H.)

Oleh:

ANDI RIDONI
NPM 1621020155
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M

**TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DALAM MENYUKSESKAN PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah (S.H.)**



Oleh :

**ANDI RIDONI
NPM 1621020155**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Khoirul Abror, M. H.

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M. H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan maupun ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Keberadaan partai politik tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Hal ini tentu menjadi sebuah tanggungjawab tersendiri bagi partai politik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah di antaranya yaitu bagaimana tanggung jawab DPC PPP dan DPD Golkar Kabupaten Tanggamus dalam upaya menyukseskan pemilu dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tanggungjawab DPC PPP dan DPD Golkar Kabupaten Tanggamus dalam menyukseskan pemilu. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggungjawab DPC PPP dan DPD Golkar Kabupaten Tanggamus dalam upaya menyukseskan pemilu dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tanggungjawab DPC PPP dan DPD Golkar Kabupaten Tanggamus dalam menyukseskan pemilu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini diantaranya: *Pertama*, DPC PPP dalam menyukseskan pemilu melakukan sosialisasi tentang pemilu berupa seminar, ceramah dan tanya jawab, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling mudah digunakan dan dapat diterima oleh peserta yang mengikutinya. Selanjutnya Partai Golkar dalam menyukseskan pemilu melakukan 2 cara yang terdiri dari memperbanyak jumlah kursi di DPR Kabupten Tanggamus dan melakukan sosialisasi program kerja. *Kedua*, Cara yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR untuk menyukseskan pemilu yaitu dengan cara berbagi ilmu pengetahuan atau *knowledge sharing*. Dalam manajemen pengetahuan, *knowledge sharing* merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi dan merupakan salah satu cara sebuah organisasi untuk mencapai kesuksesan. *Knowledge sharing* ialah suatu perilaku untuk menyebarkan pengetahuan dari satu orang terhadap masyarakat dalam suatu kegiatan seperti sosialisasi, ceramah, tanya jawab dan kegiatan lain sebagainya. Dalam *fiqh siyasah*, Islam sangat mendorong dan memotivasi perilaku *knowledge sharing* sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nissa' Ayat ke-58.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tanggung Jawab Partai Politik Partai
Persatuan Pembangunan dan Golongan
Karya dalam Menyukkseskan Pemilihan
Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan dan Dewan Pimpinan
Daerah Golongan Karya Kabupaten
Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : Andi Ridoni

NPM : 1621020155

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)”**, disusun oleh: **Andi Ridoni, NPM: 1621020155**, Fakultas: **Syari'ah**, Program studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Frenki, M.SI.

(.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

(.....)

Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. Khoirul Abror, M.H

(.....)

Penguji II : Erik Rahman Gumiri, M.H

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khoiruddin, M.H
NIP. 1962102219930310

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisaa’: 58)*¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka Indah, 2018), h. 272.

PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Taisir Su'ud (Ayah tercinta), beliau pahlawan sekaligus pemimpin yang hebat dikeluarga kami.
2. Thoibah S.Pd (Ibu tercinta), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak aku didalam kandungan hingga dewasa seperti saat ini, guru yang paling terbaik bagiku, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku.
3. Bang Roma S.kom dan bang Deki S.kom dan Kaka Yani Amd.kom dan Kaka Nova Amd.keb yang kusayangi, terimakasih atas dukungannya selama ini.
4. Teman-teman Organisasi Penggiat Tanggamus Seni yang kusayangi, terimakasih atas dukungan dan suportnya selama ini, yang selalu menghibur saya disaat jenuh mengerjakan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 05 Maret 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Taisir dan Thoibah S.Pd. Jenjang pendidikan akademis penulis di mulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada SDN 02 Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Model Talang Padang dan lulus pada tahun 2013. Memasuki jenjang berikutnya, penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Sinar Harapan Talang Padang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur UM-PTKIN di Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat taufik, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini.



Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)” diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan yang ada, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka penulis tidak bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Hi. Muhammad Mukri, M.Ag. yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung lebih baik lagi dan membawa banyak perubahan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Dr. Hi. Khairuddin, M.H.
3. Kepala Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Frenki, M.Si.
4. Bapak Dr. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu mendukung dan mensupport untuk segera menyelesaikan studi dengan waktu tepat.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing 2 yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Bapak Ibu dosen beserta staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus yang sudah memberikan pelayanan berupa pemberian data kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman Siyasah 2016 kelas B Mail, Okta, Nindy, Mutia, Panda, Sudirman, Soni, Dapri dan lainnya yang tak bisa

disebutkan satu persatu yang sudah mau menemani dan mendengarkan keluh kesah saat pengerjaan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat.

9. Buat teman-teman kosan Aldi, Fitra, Agung, Iqbal, terimakasih sudah mau membantu saya.
10. Buat para kawan-kawan Siyasah 2016 yang sudah mau berproses dan belajar bersama.
11. Buat para keluarga besar dari Ibu dan Ayah Alhamdulillah Skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktunya dan doakan cepet dapet kerjaan ya.
12. Buat para organisasi yang pernah dan sedang diikuti penulis, terima kasih sudah mengajarkan hal-hal baru dan telah mengajarkan arti dari sebuah pertemanan, kekeluargaan dan kebersamaan.
13. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal sepanjang hidupku.

Bandar Lampung,

Penulis

Andi Ridoni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah.....	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian.....	14
H. Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Partai Politik	
a. Pengertian Partai Politik	22
b. Fungsi Partai Politik.....	24
c. Tujuan Partai Politik	34
2. Pemilihan Umum	
a. Pengertian Pemilihan Umum.....	36
b. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	40
c. Dasar Hukum Pemilihan Umum.....	43
3. Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	47
a. Pengertian Politik dalam Perspektif Fiqh Siyasah	47
b. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam.....	49
c. Tujuan Politik Islam.....	52
d. Konsep Islam Tentang Pemilihan Umum.....	54
B. Tinjauan Pustaka.....	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan	
1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan.....	59
2. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan	64
3. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan.....	65
4. Profil Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanggamus	66
5. Prinsip Perjuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanggamus	67
6. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanggamus	70
B. Partai Golongan Karya	
1. Sejarah Partai Golongan Karya	73
2. Visi dan Misi Partai Golongan Karya	80
3. Tugas Pokok Partai Golongan Karya	83
4. Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus	85
5. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.....	86

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tanggungjawab Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus dalam Menyukseskan Pemilihan Umum	90
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggungjawab Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus dalam Menyukseskan Pemilihan Umum	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
--------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu, agar menghindari penafsiran yang berbeda dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dengan memberikan arti dan kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul ini. Adapun Judul Skripsi ini yaitu: **“Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)”** yaitu sebagai berikut:

Tanggung Jawab Partai Politik dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum adalah Bagaimana Cara Partai Politik dalam melakukan kewajiban Menyukkseskan Pemilihan Umum, Menjaga kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban yang harus di tanggung jawab kan atau dilaksanakan. seperti yang tertulis juga di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 13 huruf f.

Berdasarkan Penjelasan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul *“Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai PPP dan DPD Partai Golkar Kabupaten Tanggamus)”* Adalah sebuah kajian penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum islam/fiqh terkait kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan untuk menyukkseskan pemilihan umum terhadap problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik dalam suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, dan apa saja yang dilakukan partai politik dalam menyukkseskan pemilu.¹

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Penelitian ini untuk mencari perbandingan antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Golongan Karya di Kabupaten Tanggamus Mengenai Tanggung Jawab Partai politik dalam menyukkseskan pemilu yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan

¹Agus Sulistyو dan Adi Mulyadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.186.

Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya di Tanggamus. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya mencakup penataan partai politik.²

2. Secara Subjektif

- a. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Cabang Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)” belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

²Rafael, Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.152.

- c. Literatur dan informasi yang berkaitan dengan topik tersebut tersedia sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan Tanggung Jawab Partai Politik Menyukkseskan Pemilu.³

C. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Politik Indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran Partai Politik tidak hanya saluran aspirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntunan keseluruhan dalam demokrasi. Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru. Sementara itu tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan dan bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan umum.⁴

Dalam kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting yaitu melalui kegiatan pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengenal fungsi dari sebuah partai dan kewajiban nya. Dengan sosialisasi partai politik tersebut kepada masyarakat, agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Begitu juga dengan partai politik harus menjalankan hak dan kewajibannya sehingga bisa membuat

³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.160.

⁴Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.134.

Pemilihan Umum itu sukses dalam segi apapun. Salah satunya dalam kegiatan pemilu mau itu pilpres atau pilkada dan pemilu legislative, peserta pemilu meyakinkan para pemilih untuk menawarkan apa saja visi misi dan program yang akan dijalankan dalam politik dan apa saja kewajiban partai politik, salah satunya bagaimana tanggung jawab partai politik dalam menyukseskan pemilu. Pemilih diberi kebebasan dalam memilih tidak ada paksaan dan juga *money politik*, dan semua bisa memilih tanpa ada alasan kertas suara habis.

Dalam kampanye terbuka yang sering kita lihat, dan bukan rahasia umum lagi bahwa dalam kampanye kebanyakan partai politik hanya memberikan hiburan tanpa edukasi seperti di selingi dengan materi tentang tanggung jawab partai politik dalam menyukseskan pemilu, atau hak dan kewajiban partai politik, sehingga menyebabkan warga negara kurang mengetahui kewajiban partai politik dan tanggung jawab partai politik dalam menyukseskan pemilihan umum. Karna di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di Pasal 13 Huruf f, Hak dan Kewajiban Partai Politik salah satunya Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, jadi sudah terlaksana atau sudah Terealisasi belum Undang-Undang tersebut, tentang Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum.

Golongan Karya didirikan pada tanggal 20 oktober 1964 sebuah partai politik yang pada masa pemerintahan soekarno yang menandai pengaruh partai komunis indonesia dalam kehidupan partai politik terus berkembang merubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu sebuah organisasi peserta pemilu. Partai golongan karya mempunyai visi berjuang terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dan dengan masyarakat yang beriman dan taqwa. Misi partai Golongan Karya sebagai berikut:

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat politik.
2. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menduduki posisi-posisi politik atau jabatan publik.
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.⁵

Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama

⁵ (<https://partaigolkar.or.id/visi>) diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 08.00 WIB

(NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai beberapa bidang, yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan. dalam bidang agama, Partai Persatuan Pembangunan mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini diwujudkan dengan sikap saling toleransi antar umat beragama. Dalam bidang politik, Partai Persatuan Pembangunan terfokus dalam aspek penguatan ke-lembagaan, mekanisme dan budaya politik yang ber-demokratis dan ber-akhlaqul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.⁶

Hal ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, Partai Persatuan Pembangunan lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan. Menegakkan supremasi hukum akan selalu dijunjung tinggi oleh Partai

⁶<https://PartaiPersatuanPembangunan.or.id> diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB

Persatuan Pembangunan dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penguatan institusi dan instrumen penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.

Visi Partai Persatuan Pembangunan:

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi Partai Persatuan Pembangunan adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Misi Partai Persatuan Pembangunan (Khidmat Perjuangan):

Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan mencegah berkembangnya paham-Paham atheisme, komunisme, marxisme, leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai

ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika.

Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis,

materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Menyimak visi misi partai golongan karya dan partai persatuan pembangunan kehadiran partai politik sebagai pengadilan atau parlemen menjadi penanda pentingnya transformasi politik klasik ke metode modern. Berdasarkan ideologi partai, bahwa tentunya ada perbedaan antara partai Nasionalis dan Partai Islam. Hal yang menjadi perbedaan yang paling mendasar adalah nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada para kadernya.

Partai politik tidak dapat dilepaskan dari peran yang berkaitan dengan pengelolaan negara, sedangkan kelompok kepentingan dan penekan tidak secara langsung berhubungan dengan tugas itu. Mengenai peran partai dalam pendidikan politik yaitu mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu.

Partai politik juga mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu dan pemilu salah satu kurus pendidikan warga negara yang bersifat masal. Dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) terdapat mata pelajaran mengenai ilmu politik yang mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia.⁷ Pendidikan kewarganegaraan adalah “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.

⁷Barkey, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), h.54.

Dalam Al-Quran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas: Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan: Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikut pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. Diantaranya

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang. Yaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya. (Q.S. Al-Maidah : 56).*⁸

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana Tanggung Jawab Partai Politik dalam Menyukkseskan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan objek penelitian yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya bertempat di Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus.⁹

⁸Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, *Al Ma'idah Ayat 56*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h.117.

⁹Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami* (Kairo: Nahdhah Mishr, 1419), h.184.

Tabel 1
Yang menarik dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya

No	Partai Persatuan Pembangunan	Golongan Karya
1	Satu-Satunya Partai yang berasaskan Islam	Partai yang tidak berasaskan Islam/Nasionalis
2	Persatuan dari ke empat Partai yaitu Parmusi, NU, PSII dan Perti bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan	Sudah berpengalaman dalam segala bidang sejak dari orde baru hingga reformasi dan sampai saat ini
3	Lambang Ka'bah merupakan cirri kebesaran Islam yang di dapatkan hasil istikhoroh para ulama di depan Ka'bah	Tentang Paradigma baru nya artinya dalam paradigma baru ini bisa mengikuti zaman dan selalu masuk 3 besar Nasional

Sumber: Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Pertama, Fokus penelitian adalah Tanggung jawab partai politik dalam menyukkseskan pemilihan umum perspektif fiqh siyasah dan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanggamus.

Kedua, Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Partai Politik dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Partai Politik dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Partai Politik dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap tanggung jawab Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum di Tanggamus.

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi di Kabupaten Tanggamus.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai pelaksanaan kewajiban partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah Partai Politik untuk dapat menjalankan Kewajiban nya sesuai dengan Undang-undang Partai Politik dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.¹⁰ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹¹ Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan sejarah, struktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses

¹⁰Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.41.

¹¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.24.

penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlah nya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.¹² Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang **“Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.”**

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹³

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh dari : Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tanggamus dalam hal ini adalah Jukman Efendi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang partai persatuan pembangunan Kabupaten Tanggamus beserta pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996),h.33.

¹³Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanggamus. Dan Heri Ermawan selaku ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Tanggamus beserta pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban partai politik berdasarkan Undang-Undang partai Politik dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Partai Politik dalam menyukseskan pemilu, khususnya pada Partai Persatuan Pembangunan dan partai Golongan Karya Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Tanggamus.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:¹⁴

- 1) Bahan hukum, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan peraturan lainnya, antara lain:
- 2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁴*Ibid*, h.58.

- 5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Metodologi Pengumpulan Data

a. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. dengan ini penelitian dapat dengan mudah memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait yaitu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

dari pertanyaan itu.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mengikuti panduan dalam wawancara ini dengan H. Jukman Efendi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Agus Munada S.E selaku Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Opini Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Tanggamus yang berhubungan dengan pelaksanaan Kewajiban partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai, khususnya pada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Tanggamus.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai Tanggung Jawab Partai Politik dalam menyukseskan pemilu di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h.186.

4. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Selain itu juga editing adalah salah satu cara untuk mrnghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁷

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.12.

¹⁷Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.¹⁸



¹⁸ *Ibid*, h.4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Dalam bukunya *Economic Et Societie* Marx Weber memberikan definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi public yang bertujuan untuk membawa pemimpin nya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.¹

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk, Ide dasar dari partai adalah keberadaan partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan tidak selalu mengganggu

¹ Firmansyah, *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Postitoning Politik Di era demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008),h.66.

kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataan nya. Dengan mengutip Voltaire, Sartori mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam negara”. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “partie”, bahasa latin yang berarti “membagi”.²

Menurut Roy C.Macridis, partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.³

Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), dan mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.⁴

²Giovanni Sartori, *Parties And Party Systems, A Framework For Analysis*, (Colchester: European Consortium for Political Research Press, 2005), h. 3-4.

³Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), h.7.

⁴ *Ibid.*, h. 8.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas mengenai partai politik, partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara terutama di negara dengan menerapkan sistem demokrasi. Secara sederhana partai politik merupakan representation of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

Menurut Miriam Budiarjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.⁵

b. Fungsi Partai Politik

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998),h. 16.

dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Budiardjo dalam menyelenggarakan demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut⁶:

a) Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat. Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

b) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat diperoleh secara sengaja melalui pendidikan

⁶ *Ibid*, h. 17.

formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

c) Sebagai sarana rekrutmen politik


Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d) Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial-ekonomi, maupun agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan

perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang- undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2011 Pasal 12:

- 
- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar
 - b) Menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
 - d) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
 - e) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
1. Fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politik, partai politik memberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak politik yang dilindungi sebagai hak konstitusional.
 2. Partai politik dalam fungsinya menciptakan iklim yang kondusif berkaitan dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi karena partai

politik sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda, yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan namun tujuannya adalah dalam rangka memajukan bangsa dan Negara.

3. Partai politik sebagai aspirasi politik warga Negara, bahwa jalur konstitusional yang diatur dalam UUD dan disediakan untuk berpartisipasi politik untuk masyarakat. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

4. Sebagai sarana rekrutmen politik bahwa, partai politik menyediakan kader-kadernya dalam upaya pengisian jabatan politik yang telah ditentukan secara konstitusional.

5. Partai politik dalam menyiapkan kadernya untuk jabatan politik juga sangat penting memperhatikan baik secara demokratis yaitu dipilih secara langsung/tidak langsung oleh rakyat, juga berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender. Bahwa, tidak semua jabatan politik yang tersedia dapat diisi oleh satu gender tertentu, maka dibutuhkan alternatif gender dan partai politik harus mampu untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sehubungan adanya pemisahan fungsi partai politik menurut bentuk negaranya maka penulis memilih, fungsi partai politik sebagai berikut:

1) Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik

- 2) Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik
- 3) Partai Politik sebagai sarana pengelola konflik
- 4) Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik
- 5) Partai Politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan
- 6) Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik

Untuk lebih memahami fungsi-fungsi partai politik yang ada maka penulis akan menjabarkan mengenai sedikit penjelasan fungsi Partai Politik sebagai berikut:⁷

1. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik Menurut seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992).

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*Political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).

Sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam *Political Culture* menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik ke dalam suatu masyarakat.⁸

Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman

⁷Mahrus Irsyam dan Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, Laboratorium Ilmu Politik (Fisipol, UI, 2003), h.141.

⁸Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty (Yogyakarta, 1984), h.98.

kepada masyarakat mengenai politik, agar masyarakat memahami politik dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam Partai Politik dan ikut berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses ini Partai Politik dapat dikatakan telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik. Sosialisasi pada masyarakat adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh Partai Politik untuk memberikan kesadaran politik pada masyarakat.

2. Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah suatu proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif antara lain sebagai berikut:⁹

- a. *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga di mana seorang calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization*, di mana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity*, di mana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.

⁹ Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* "Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia", Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2004), h.101.

- d. *Apprenticeship*, di mana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables*, di mana di sini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas sajanamun dinilai pula faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.
- f. *Motivations*, di mana hal ini merupakan faktor yang paling penting,yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

3. Partai Politik sebagai pengelola konflik

Fungsi ketiga adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain.¹⁰ Jika Partai Politik banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, (Jakarta, 1977), h.10.

menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

4. Partai Politik sebagai sarana Komunikasi Politik

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyata dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat luas.¹¹

5. Partai Politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan

Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginput-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil

¹¹Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Gajah Media Pratama, Jakarta), h.238-239.

kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Agregasi Kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di Negara yang menganut paham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik sendiri.

6. Partai politik sebagai sarana Partisipasi Politik

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Serta partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau

spontan, mantap atau *sporadic*, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain:¹²

- a. *Autonomous Partisipation* adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan yang rendah.
- b. *Mobilized Partisipation* adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah. Dalam hal ini partai politik adalah wadah warga negara untuk berpartisipasi politik.

c. Tujuan Partai Politik

Tujuan umum partai politik :

- 1) Mewujudan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana di maksud dalam pembukaan undang –undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia

¹²Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arloka Surabaya, 1994), h.572.

- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia.¹³

Tujuan khusus partai politik:

- 1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Berdasarkan uraian atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan partai politik adalah melakukan sosialisasi politik. Satu, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, kedua, rekrutment politik yaitu seleksi dan pemilihan satu pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Ketiga, partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Empat, pemandu kepentingan, mengatur lalu lintas kepentingan yang seringkali bertentangan dan memiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Lima, komunikasi politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan

¹³ Haryanto, *Partai Politik Suatu tinjauan umum*. (Liberty Yogyakarta, 1984), h.123.

¹⁴ Oka Mahendra, *Prospek Partai Politik Pasca 2004*, (Jayasan Pancur Siwah, 2004), h.99.

dari masyarakat kepada pemerintah. Enam , pengendalian konflik, partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok. Tujuh, kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan , kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedelapan Partai Politik punya tanggung jawab dalam menyukseskan pemilihan umum.¹⁵

2. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.¹⁶

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme

¹⁵Eman Hermawan, *Politik Membela yang benar, Teori kritik dan Nalar*(Yogyakarta: Kencana, 2001), h.112.

¹⁶C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), h.47.

yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.

Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah

dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Haris merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.¹⁷

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan Kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hutington menyatakan bahwasan nya buah Negara bisa disebut demokratis jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.

Menurut Karim pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari

¹⁷Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik Introduction to Political Science* (Jakarta: Raja Rafindo, 2007), h.95.

bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. Penjelasan diatas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi.

Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegak nya Pancasila dan dipertahankan nya UUD1945.

Pemilihan Umum mempunyai sistem Single-member Constituency yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem Distrik. Dan Sistem Multi-member Constituency yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang.¹⁸

¹⁸Haris, *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada*, 2006,h.10.

b. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹⁹

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

¹⁹Yansyah Rizki, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi* (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004) (Bandung: IDEA Publishing, 2007), h.3.

1) Fungsi Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Menurut Ginsberg fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara.²⁰

Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (Consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana

²⁰Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h.11.

kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.²¹

2) Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.²²

3) Fungsi Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian

Penguasa. Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

²¹Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP21, 2003), h.19.

²²Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Publishing, 2009), h.80.

- 4) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.²³

c. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara Pemilu 2019 bisa langsung dilihat di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 280 ayat 1 yang memuat 5 poin penting yaitu:²⁴

- 1) Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar

²³ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, lima 2004), h.68.

²⁴ Soekamti, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta), h.96.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
- 3) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
- 4) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- 5) Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran

money politic. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.²⁵

Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 13 huruf b

²⁵ Oka Mahendra, *Pedoman Praktis Legal Drafting*, (Jakarta Pusat: Setara Press, 2017), h.40.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU yang selanjutnya disebut PKPU, adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.

PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.”²⁶

²⁶ <https://jdih.kpu.go.id> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 12:40 WIB

3. POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

a. Pengertian Politik dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam Al-Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa-yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya).

Al-Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:²⁷

1. “Tujuan” yang hendak di capai melalui proses pengendalian,
2. “Cara” pengendalian menuju tujuan tersebut

Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian *siyasah* lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara', realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun

²⁷ Abdullah Zawawi, *Politik Dalam Perspektif Islam*, (1Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015).h.9.

rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi “netral”.

Definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam (as-siyasah syar’iyyah) dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni :²⁸

- 1) Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam (Hukum Islam).
- 2) Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh siyasah.
- 3) Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

Adapun dalil-dalil Al-qur’an tentang politik seperti Firman Allah dalam Surat Al-baqarah Ayat 30 yang berbunyi:²⁹

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik islam*(Jakarta: Kencana,2014), h.4.

²⁹Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur’an Terjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema, 2009), h.89

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَخَنُ نُسُبَۤہُۥنَّ یَحْمَدُکَ وَتُقَدِّسُ لَکَ ۚ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۛ﴾

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Jelaslah bahwa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda :

"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (yaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani).

b. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

1. Musyawarah

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua

adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

2. Keadilan

Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang berseberang di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3. Kebebasan

Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah

tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

4. Persamaan

Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.

5. Hak menghisab pihak pemerintah

Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

6. Diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi

Dikalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbezaan ras, bahasa, ras, wilayah ataupun semua pertimbangan materialistik lainnya serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan Millah Al-Islamiyyah.

7. Kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya

Kedaulatan tertinggi hanya berada di tangan Allah semata. Dasar kekuatan politik Islam yang pertama adalah Allah SWT, tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia hanya bersifat temporal karena yang berkuasa secara mutlak adalah Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi.

Kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh kekuatan hukum yang ada, karena Ia sendiri adalah sumber dari hukum tersebut. Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syari'ah, ada juga prinsip-prinsip tambahan (subsider) yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih siyasah (hukum ketatanegaraan dalam Islam). Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi (syura) mesti dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang dan menjaga nilai-nilai syari'ah dengan memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut.³⁰

c. Tujuan Politik Islam

Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya

³⁰ Aji Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.15.

pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam:³¹

- a) Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam.
- b) Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih.
- c) Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.
- d) Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia.
- e) Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
- f) Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
- g) Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak.
- h) Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan dari pada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-hal pentabiran negara.

³¹ Abdullah Zawawi, *Politik Dalam Perspektif Islam*. (1Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015).h.13.

- i) Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad-Din.

d. Konsep Islam tentang Pemilihan Umum

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat³².*

Pemilihan Umum dalam pandangan islam juga upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa, dan kewajiban menegakkan imamah.

³²Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema, 2009), h.87

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh ini yang penulis ketahui, telah banyak pembahasan mengenai pemilihan umum perspektif *fiqh siyasah*. Dalam *review* studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Berikut ialah tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis dapatkan, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Angga Natalia, 2018 dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia”** yang bertujuan untuk untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia sekaligus menganalisis mengenai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sesuai dengan KPU dalam sejarah pemerintahan Islam yang ada pada masa nabi Muhammad dan al-Khulafaurrasyidin yang menjadi referensi umat Islam untuk mendirikan negara Islam atau khlifah Islamiyah pada saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research*, bersifat deskriptif analitis

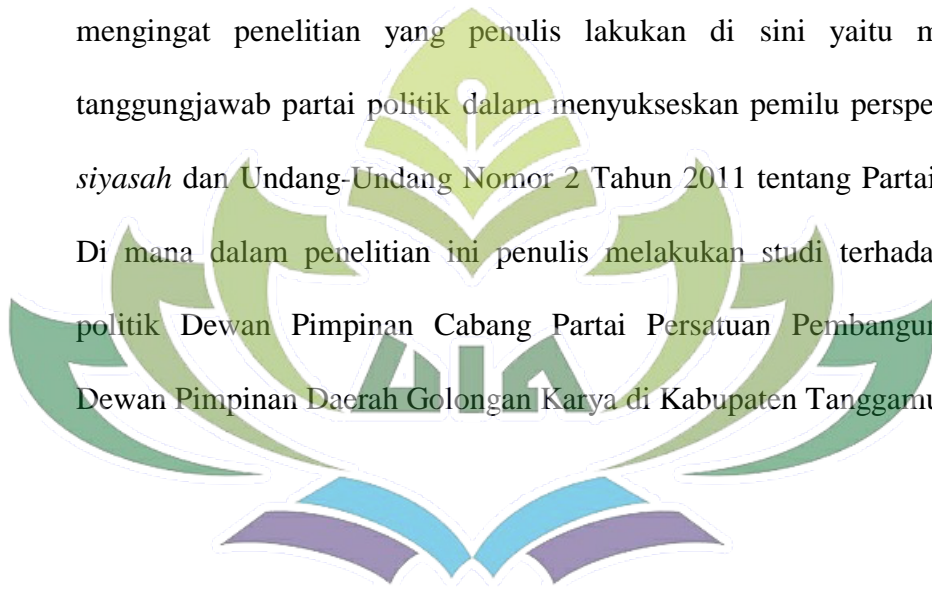
menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa undang-undang tentang Pemilu, Peraturan KPU, buku-buku dan literatur yang sesuai dengan objek yang dibahas. Sedangkan untuk hasil temuannya peneliti dalam penelitian ini bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia dan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fiqh siyasah bahwa untuk mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin harus ada proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang independent. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latarbelakang seseorang.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Eka Agustine Sofyana pada tahun 2020 yang berjudul **“Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam”** yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan Pilpres Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara sebagai metode utama dan metode dokumentasi sebagai metode pendukung. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

partisipasi mereka, yaitu pendidikan politik yang hanya didapat di sekolah dan para seniornya menjelang pemilu, faktor karakteristik seseorang yaitu adanya relasi antara Santri dan para Kyai nya yang sangat erat, dan faktor karakteristik individu, yaitu perbedaan pemahaman disetiap individu, sehingga berbeda pula kesadaran politik mereka. Pandangan Fikih Siyash terhadap faktorfaktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu jika dilihat dari keikutsertaan Santri Roudlotussholihin dalam menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada pemilu 2019 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin sebagai rujukan Q.S an-Nisa ayat 59. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih pemula di Pesantren Roudlotusholihin yaitu Adanya rangsangan politik, yaitu adanya relasi antara Kyai dan Santri, Adanya faktor pendidikan, kesadaran politik dan sikap ingin tahu, domisili yang jauh untuk untuk dijangkau, sehingga membutuhkan waktu luang dan biaya yang banyak dan faktor lainnya yang terdapat pada diri Santri, seperti sifat malas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara. Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Maka dari itu kesadaran politik Santri pemilih pemula sangat diperlukan,

semakin tinggi kesadaran Santri pemilih pemula tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, tentunya penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. mengingat penelitian yang penulis lakukan di sini yaitu mengenai tanggungjawab partai politik dalam menyukseskan pemilu perspektif *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di mana dalam penelitian ini penulis melakukan studi terhadap partai politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya di Kabupaten Tanggamus.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab Juz XVIII* Kairo: Daar al-Hadith, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Imaah, Muhammad. *Ma'rakatul Mushthalahat Baina Al-Gharbi Wal Islami*, Kairo: Nanhdah Mishr, 1419H.

Zakaria bin Muhammad. *Minhaj Al-Tullab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.

Bukku-Buku

Agus Sulistyo dan adi Mulyadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Barky, Noor MS. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

C. S. T. Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1989.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik Introduction to Political Science*, Jakarta: PT. Raja Rafindo, 2007.

Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Ghalia indonesia, 2006.

Firmansyah, *Memahami Partai Politik, Komunikasi dan Postitoning Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

- Hamid, Agmad Farhan. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Haris, *Kecenderungan Pencalaonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada*, Jakarta: Kencana Press, 2006.
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umu*, Ypgyakarta; Liberty, 1984.
- Hermawan, Eman. *Politik Membela yang Benar, Teori Kritik dan Nalar*, Yogyakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana: 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- Khoiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi "Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mahrus Irsyan dan Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, Universitas Indonesia: Laboratorium Ilmu Politik, 2003.
- Mahendra, Oka. *Pedoman Praktis Legal Drafting*, Jakarta: Pusat Setara Press, 2017.
- Mahendra, Oka. *Prospek Partai Politik Pasca 2004*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Manan, Bagir. *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gajah Media Pratama, 2001.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

Rafael, Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Rizki, Yansyah. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*, Bandung: IDEA Publishing, 2007.

Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems, a Framework for Analysis*, Colchester: European Consortium For Political Research Press, 2005.

Satjipto, Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Publishing, 2009.

Soekamti, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Sofyan, Ali. *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Jurnal-Jurnal

Zawawi, Abdullah. "Politik dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ulumul Qur'an Vol.V No.1*, Maret 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

<https://jdih.kpu.go.id> Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 12.40 WIB.

<https://partaigolkar.or.id/visi> Diakses Pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 08.00 WIB.

<https://partaipersatuanpembangunan.or.id> Diakses Pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 20.00 WIB.

